

**ANALISIS INVENTARISASI PENGELOLAAN ASET TANAH  
PADA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN, DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Diploma IV Pertanahan



**Disusun oleh:**

**DESI AIRIN TABUNI**

**NIT. 20293391**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## **ABSTRACT**

The problem of inventory management of land assets in South Manokwari Regency faces a number of challenges, namely the construction of road infrastructure, data discrepancies, the transfer of data during the division of districts, and the creation of land certificates. The Department of Land, Housing and Settlement Areas also assists the district government in dealing with these problems. This includes managing land assets and complex issues related to making land certificates which are considered complicated by the community because of the long process. However, these challenges can be overcome with outreach efforts to the local community about the importance of land certificate ownership, as well as with support from the DPPKP in managing local government land assets. A comparison of menu completeness between the SAKTI and SIMDA-BMD Applications can be seen from the menu available in both applications. The menu in the SAKTI application is well organized and complete for each option, including information such as year period, item usage period, quantity or unit, name, size, and so on. The SAKTI application has implemented national standards in recording and management, as one of the official applications of the Indonesian Ministry of Finance, Directorate General of Treasury. Meanwhile, SIMDA-BMD is also an application from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia which is used at the regional level, including at the South Manokwari Regency DPPKP office. The menu in the SIMDA-BMD application is not completely complete, even though the management and recording are good. However, there is some data that has not been recorded or recorded in the application. Thus, it can be concluded that the SAKTI application is superior to the SIMDA-BMD application because it has a good structure and follows national standards. However, the SIMDA-BMD application is a regional standard application, so its use is limited to the district government level. Even so, the system in the SIMDA-BMD application is updated every five years.

**Keywords:** Asset Management Inventory, Land Assets, Comparative SAKTI and SIMDA-BMD Applications

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
MOTTO.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR GAMBAR.....	XI
DAFTAR TABEL .....	XII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XIII
INTISARI.....	XIV
ABSTRACT.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9

<b>A. KAJIAN LITERATUR.....</b>	<b>9</b>
<b>B. KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>11</b>
<b>C. KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
<b>A. FORMAT PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
<b>B. LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
<b>C. JENIS DAN SUMBER DATA .....</b>	<b>25</b>
<b>D. SUBJEK PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....</b>	<b>26</b>
<b>E. TEKNIK ANALISIS DATA.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
<b>A. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
<b>B. GAMBARAN UMUM KONDISI MASYARAKAT KABUPATEN MANOKWARI SELATAN .....</b>	<b>35</b>
<b>C. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
<b>D. GAMBARAN UMUM ASET TANAH PADA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB V INVENTARISASI PENGELOLAAN ASET PADA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. INVENTARISASI PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK DAERAH.....</b>	<b>45</b>
<b>B. SISTEM IVENTARISASI .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB VI ANALISIS PERMASALAHAN INVENTARISASI PENGELOLAAN ASET .....</b>	<b>62</b>
<b>A. HASIL ANALISIS PERMASALAHAN INVENTARISASI PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK DAERAH .....</b>	<b>62</b>

<b>B. HASIL ANALISIS KOMPARATIF SAKTI DAN SIMDA-BMD .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>67</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan Teknologi Informasi dipicu oleh pesatnya kemajuan teknologi komputer. Fenomena ini disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang semakin berat, yang mendorong kebutuhan untuk bekerja dengan lebih mudah, efisien, dan hemat waktu. Secara teknis, sistem informasi (*Information System*) dapat dijelaskan sebagai kumpulan komponen yang saling terkait, yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam suatu organisasi (Pradana, 2016). Kadir menyatakan bahwa sistem Informasi terdiri dari beberapa elemen (manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), melibatkan proses transformasi data menjadi informasi, dan bertujuan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Maknunah, 2015).

Pada sistem informasi pencatatan aset baik dalam bidang bisnis atau keuangan maupun bidang pertanahan dan bidang lainnya, yang awal mulanya hanya tersistem manual, namun berdasarkan perkembangan tersebut proses penyajian dan pengelolaan data sistem informasi pencatatan aset menjadi lebih efektif dan efisien dari pada sebelumnya. Hal ini dikarenakan sudah menggunakan sistem komputerisasi yang dapat mempermudah penggunaan informasi dalam hal pengambilan keputusan terutama pada pencatatan aset.

Menurut Amiasih & Andini, aset adalah elemen penting yang mendukung operasional suatu organisasi. Aset bisa berupa barang, sumber daya manusia, dan uang (Goods dkk., 2023). Secara umum, aset merujuk pada segala sesuatu yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau entitas lain yang memiliki nilai ekonomi atau potensi untuk memberikan manfaat di masa depan. Aset bisa berupa barang, properti, hak, atau sumber daya yang bisa diperdagangkan atau dimanfaatkan

untuk menciptakan nilai tambah atau pendapatan. Aset dapat berbentuk finansial, fisik, intelektual, atau non-fisik. Dalam konteks keuangan, aset sering menjadi perhatian utama dalam pengelolaan kekayaan, investasi, pengambilan keputusan bisnis, dan perencanaan keuangan.

Dalam pencatatan aset, terutama aset daerah, penggunaan pencatatan digital sangat penting karena mencakup berbagai jenis aset daerah, termasuk aset finansial seperti investasi, tabungan, atau aset keuangan lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset-aset ini dapat dicatat secara digital untuk memantau nilai, kinerja, atau alokasi dana yang digunakan.

Tahapan pengelolaan aset, yang diatur oleh pengelolaan barang milik daerah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik, meliputi beberapa tahapan seperti perencanaan, pengadaan, penggunaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penatausahaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, tuntutan ganti rugi, pembiayaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan siklus keuangan daerah dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Program aplikasi komputer seperti SIMDA BMD dikembangkan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah, baik sebagai entitas pelaporan (SKPKD) maupun akuntansi (SKPD), dengan tujuan meningkatkan tata kelola yang baik melalui pengendalian transaksi dan penyajian informasi yang akurat.

Kabupaten Manokwari Selatan terletak di provinsi Papua Barat, Indonesia, dengan ibu kota di distrik Ransiki. Kabupaten ini dibentuk dari pemekaran Kabupaten Manokwari pada 17 November 2012, bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak. Manokwari Selatan terdiri dari enam distrik yaitu Ransiki, Oransbari,

Neney, Dataran Isim, Momi Waren, dan Tahota. Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia 2024, populasi Manokwari Selatan mencapai 35.949 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 13 jiwa per kilometer persegi. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduknya meningkat menjadi 37.674 jiwa.

Kabupaten Manokwari Selatan adalah kabupaten otonom baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012, sebagai bagian dari kebijakan otonomi khusus di Papua Barat. Otonomi khusus untuk Provinsi Papua Barat dan Papua diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yang memberikan wewenang lebih besar kepada provinsi-provinsi ini untuk mengatur diri sendiri. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 nomor 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hukum yang berlaku. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi mereka demi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan otonomi khusus untuk Provinsi Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat Papua, mengingat kondisi pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial politik yang masih memerlukan perhatian serius. Dalam pelaksanaan otonomi khusus, setiap daerah diberi kebebasan oleh pemerintah pusat untuk menangani masalah di tingkat kabupaten, termasuk pengelolaan keuangan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan fiskal. Kabupaten Manokwari Selatan, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari, menunjukkan kemajuan dalam pembangunan berdasarkan berbagai indikator yang ada.

Kabupaten Manokwari Selatan telah melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan daerahnya melalui dua cara utama. Pertama, dengan



mengembangkan beberapa daerah pariwisata seperti Momi Waren, Oransbari, Ransiki, dan Neney, yang memiliki objek wisata seperti Gunung Botak, Pantai Oransbari, Hutan Mangrove Oransbari, Pantai Raipawi, Air Terjun Gunung Bembab, Air Terjun Neney, Air Panas Momi Waren, dan Pintu Angin. Daerah pariwisata ini juga membantu meningkatkan pendapatan daerah setempat. Kedua, Kabupaten Manokwari Selatan juga mengelola usaha pertanian, khususnya perkebunan kakao, untuk meningkatkan pendapatan petani. Upaya ini didukung melalui kemitraan antara petani kakao dan Koperasi Ebier Suth Cokran. Kemitraan ini sejalan dengan definisi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997, yang menekankan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 45 Tahun 2022 mengatur struktur dan organisasi perangkat daerah di wilayah tersebut. Peraturan ini mencakup pembentukan unit-unit kerja di tingkat pemerintahan kabupaten, termasuk tanggung jawab dan wewenang masing-masing unit, serta prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Umumnya, peraturan ini juga mencakup pembentukan dan penataan organisasi, struktur kepala daerah dan perangkat daerah, hubungan antar perangkat desa, prosedur pelaporan dan pengawasan, serta ketentuan tambahan lainnya. Salah satu isu yang sering dihadapi di Kabupaten Manokwari Selatan adalah masalah pertanahan, termasuk tanah adat, sengketa tanah, tanah terlantar, dan lainnya. Kehadiran Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Manokwari Selatan merupakan langkah untuk membantu pemerintah daerah, khususnya bupati, dalam mengelola aset daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Kantor Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPPKP) terletak di Jalan Trans Manokwari-Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan telah membentuk Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman.

Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman bertugas membantu Bupati dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang pertanahan, perumahan, dan kawasan permukiman, sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah dan pembantuan. Tugas Dinas ini meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pelayanan publik terkait pertanahan, perumahan, dan kawasan permukiman, serta evaluasi dan pelaporan di sektor tersebut. Selain itu, DPPKP juga bertanggung jawab atas administrasi internalnya dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peranannya dalam pemerintahan daerah.

Menurut Susandi & Sukisno, inventarisasi barang adalah kegiatan yang melibatkan penyusunan, pencatatan barang, atau bahan (Goods dkk., 2023). Secara umum, tujuan inventarisasi adalah untuk mencatat, mengelola, dan melacak semua barang atau aset yang dimiliki oleh suatu entitas atau organisasi. Proses inventarisasi memungkinkan entitas untuk memantau dan melacak aset mereka dengan lebih baik, termasuk mengetahui jumlah dan lokasi aset, kondisi dan nilai saat ini, serta siapa yang bertanggung jawab atas setiap aset. Inventarisasi juga membantu dalam pemantauan perawatan dan pemeliharaan dengan mencatat detail seperti tanggal pembelian, perawatan yang telah dilakukan, dan riwayat pemeliharaan, sehingga dapat menjadwalkan perawatan preventif untuk memperpanjang umur aset. Selain itu, dengan memiliki catatan lengkap tentang nilai dan kondisi aset, entitas dapat menghitung nilai total aset mereka, yang penting untuk pelaporan keuangan, penilaian aset, atau

keperluan pajak. Dengan demikian, tujuan utama inventarisasi adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aset-aset yang dimiliki oleh suatu entitas, sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan lebih efisien dan efektif.

Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah tentang apa saja permasalahan inventarisasi pengelolaan aset BMD yaitu aset tanah dan bagaimana cara menanggapi permasalahan tersebut serta melihat sistem pencatatan dengan menggunakan aplikasi SIMDA-BMD pada kantor Dinas Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manokwari Selatan serta akan melihat menu atau fitur pada aplikasi SIMDA-BMD dan akan dibandingkan dengan aplikasi SAKTI untuk melihat bagaimana sistem pencatatan.

Pada Kantor Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman sendiri belum dilakukan pencatatan dan pengelolaan aset yang maksimal. Oleh sebab itu, dengan membandingkan kegunaan SAKTI dan SIMDA-BMD untuk melihat bagaimana pencatatan dan pengelolaan asetnya, sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya seperti apa dan apa yang menyebabkan belum optimalnya pencatatan dan pengelolaan aset di DPPKP Kabupaten Manokwari Selatan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan SAKTI, aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) adalah alat yang digunakan oleh satuan kerja (satker) untuk mendukung implementasi SPAN dalam pengelolaan keuangan, dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan semua aplikasi yang digunakan oleh satker dan juga sudah memenuhi standar nasional untuk pengelolaan aset Barang Milik Negara. Fungsi utama SAKTI mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, serta menggunakan konsep database tunggal (single database). Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas

pelaporan di Kementerian Negara/Lembaga, di mana seluruh transaksi mereka dilakukan secara elektronik.

Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis menginginkan mengulas mengenai pengelolaan aset pada DPPKP menuju pengelolaan aset yang dilakukan secara maksimal dengan melakukan penelitian pada DPPKP Kabupaten Manokwari Selatan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul "Analisis Inventarisasi Pengelolaan Aset Tanah Pada Dinas Pertanahan, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Manokwari Selatan".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja permasalahan inventarisasi pengelolaan aset Barang Milik Daerah yang terjadi pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Manokwari Selatan?
2. Bagaimana menanggapi permasalahan inventarisasi pengelolaan aset Barang Milik Daerah yang terjadi pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Manokwari Selatan?
3. Analisa perbandingan pengelolaan program aplikasi SAKTI dan SIMDA-BMD terkhususnya pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Manokwari Selatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seperti apa permasalahan inventarisasi pengelolaan aset Barang Milik Daerah dan bagaimana cara untuk menanggapi permasalahan inventarisasi pengelolaan tersebut, pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Perumahan di Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Untuk mengetahui seperti apa perbandingan pengelolaan program pada aplikasi SAKTI dan SIMDA-BMD terkhususnya pada Dinas

Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Manokwari Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan:

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan penulis mengenai sistem pencatatan dan pengelolaan aset daerah.
2. Bagi DPPKP Kabupaten Manokwari Selatan, penelitian ini berguna sebagai salah satu masukan dalam sistem pengelolaan barang milik daerah sehingga dapat mengembangkan sistem pencatatan aset daerah.
3. Bagi penelitian selanjutnya, untuk memberikan referensi tambahan dengan topik penelitian yang sama.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai inventarisasi pengelolaan aset tanah di Kantor Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manokwari Selatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah inventarisasi pengelolaan aset tanah di Kabupaten Manokwari Selatan menghadapi sejumlah tantangan yaitu pembangunan infrastruktur jalan, ketidaksesuaian data, pengalihan data-data saat pemekaran kabupaten, dan proses pengurusan pembuatan sertipikat tanah, Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman turut membantu pemerintah kabupaten dalam menangani masalah-masalah ini, termasuk dalam pengelolaan aset tanah dan permasalahan kompleks terkait pembuatan sertipikat tanah yang dianggap rumit oleh masyarakat karena proses yang panjang.
2. Untuk permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dengan upaya dukungan baik dari BPN atau DPPKP dalam pengelolaan aset tanah pemerintah daerah, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang pentingnya kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah.
3. Perbandingan kelengkapan menu antara Aplikasi SAKTI dan SIMDA-BMD dapat dilihat dari menu yang tersedia dalam kedua aplikasi tersebut. Menu dalam aplikasi SAKTI terstruktur dengan baik dan lengkap pada setiap opsi, mencakup informasi seperti periode tahun, masa penggunaan barang, jumlah atau unit, nama, ukuran, dan sebagainya. Aplikasi SAKTI telah menerapkan standar nasional dalam pencatatan dan pengelolaan, sebagai salah satu aplikasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sementara itu, SIMDA-BMD juga merupakan aplikasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang digunakan di tingkat daerah, termasuk di kantor DPPKP Kabupaten Manokwari Selatan. Menu dalam aplikasi SIMDA-BMD belum sepenuhnya lengkap, meskipun pengelolaan dan pencatatannya sudah baik. Namun, terdapat beberapa menu atau fitur yang belum cantum atau berada dalam aplikasi tersebut, seperti data dengan rentang waktu yang panjang, misalnya lebih dari lima tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi SAKTI lebih unggul dibandingkan dengan aplikasi SIMDA-BMD karena memiliki struktur yang baik dan mengikuti standar nasional. Namun, aplikasi SIMDA-BMD merupakan aplikasi yang berstandar daerah, sehingga penggunaannya terbatas pada tingkat pemerintah kabupaten saja. Meski begitu, sistem pada aplikasi SIMDA-BMD diperbarui setiap lima tahun sekali.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa pandangan peneliti yang sekiranya dapat di angkat sebagai saran bagi kantor Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manokwari Selatan terutama pada Bidang Pertanahan dan bidang Admistrasi Umum maupun bagi peneliti selanjutnya.

1. Kepada Kepala Bidang Adminstrasi Umum terutama pada bidang keuangan untuk selalu update mengenai pencatatan asset baik dari yang terkecil hingga ke pelaporan keuangan yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.
2. Bagi peneliti selanjutnya, perlu diadakan penelitian ini lagi terhadap perkembangan pengelolaan penilaian aset tanah terutama pada dinas-dinas terkait.

## DAFTAR PUSAKA

### Jurnal dan Artikel

- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). *Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian. Jurnal Pilar*, 14(1), 15–31.
- Apriani, Y. (2023). PERMASALAHAN DAN UPAYA DALAM PENGELOLAAN ASET TANAH BUMN (Studi Kasus PT PLN (Persero)). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 227–235.
- Goods, L., Agile, U., Methods, D., Bpti, A. T., Informasi, S., Aset, P., Peminjaman, D. A. N., Metode, M., Agile, P., & Bpti, P. (2023). *USING AGILE DEVELOPMENT METHODS AT BPTI UHAMKA*. 5(2), 461–473.
- Henry, D., Ackerman, M., Sancelme, E., Finon, A., Esteve, E., Nwabudike, L. C., Brancato, L., Itescu, S., Skovron, M. L., Solomon, G., Winchester, R., Learning, M., Cookbook, R., Husain, Z., Reddy, B. Y., Schwartz, R. A., Brier, J., Neal, D. E., Feit, E. M., ... Rello, J. (2020). *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 34(8), 709.e1-709.e9.
- Huda, B., & Priyatna, B. (2019). Penggunaan Aplikasi Content Management System (CMS) Untuk Pengembangan Bisnis Berbasis E-commerce. *Systematics*, 1(2), 81.
- Kemampuan, A., Matematis, P., Kelas, S., Mts, I. X., Materi, P., Persamaan, S., Dua, L., & Gender, B. (2019). *Jurnal Kajian Pembelajaran Matematika*. 3(April), 1–8.
- Kinaswara, T. A., Hidayati, N. R., & Nugrahanti, F. (2019). Rancang Bangun Aplikasi Inventaris Berbasis Website Pada Kelurahan Bantengan | Kinaswara | Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK). *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi (SENATIK)*, 2(1), 71–75. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SENATIK/article/view/1073>
- Komunikasi, J. I., Ekonomi, F., Ilmu, D. A. N., & Bakrie, U. (2021). *PADA KALANGAN GAMERS SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 PADA TAHUN 2020 (SURVEI PADA GAMERS PUBGM DI WILAYAH KOTA SKRIPSI Gita Dwiputri Rachmadianti. 2020*.
- Kusumawati, M., & Rusli, Z. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(1), 245–254.
- Labasido, E. R., & Darwanis, D. (2019). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 215–236.
- Manajemen, S., Guna, S., Produktivitas, M., & Good, M. (2014). *Sedarmayanti. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Sinerja Guna Meningkatkan*



*Produktivitas Menuju Good Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 3.

- Mardiana, L., & Pirmaningsih, L. (2018). *Evaluasi Penerapan Sistem Akrual Pada Aset Tetap Di Pemda Kabupaten Gresik*. UNEJ E-Proceeding, 135–146.
- Pambudi, A. S. dkk. *Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Provinsi Papua Barat penunjang pertumbuhan dan produktivitas produksi , jasa sampai pengembangan persaingan .*, 7, (2022).
- Pauweni, S., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2017). *Pengaruh Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian dan Kondisi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 8(2), 50–61.
- Pradana, M. (2016). *Perencanaan Skema Sistem Informasi Untuk Aktivitas Manajemen*. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 65–71.
- Rahmalisa, U. (2018). *Perancangan Sistem Informasi Inventaris Barang Pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau Berbasis Web*. *Jurnal Ilmu Komputer*, 6(2), 79–84. <https://doi.org/10.33060/jik/2017/vol6.iss2.62>
- Rohmah, N. N., & Hastuti. (2021). *Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM Berbantuan Microsoft Excel*. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(3), 691–704.
- Sappe, S., Latturete, A. I., & Uktolseja, N. (2021). *Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa*. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 78. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.560>
- Suhendi, H. H. (2018). *OPTIMALISASI ASET WAKAF SEBAGAI SUMBER DANA PESANTREN MELALUI PELEMBAGAAN WAKAF (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)*. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3417>
- Suriani, N., & Jailani, M. S. (2023). *Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36.
- Umy Nadrah Simatupang, Reni Arneti, Rusdinal, & Anisah. (2024). *Implementasi Perencanaan Strategis Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah*. *Jurnal Niara*, 16(3), 606–613.
- Usman, A. H. (2021). *Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar*. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 44. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3047>
- Wijaya, H. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Teologi*. E Module, August 2013, 2.
- Yulianti Dan Puji Lestari. (2022). *Solidaritas Sosial Dalam Komunitas Syekhermania Yogyakarta Sebagai Komunitas Populer Islam*. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2(2), 1–11.
- Yulita, Y., & Gunawan, C. I. (2019). *Model Strategi Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pasar Tradisional Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat*. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 37.

## Web dan Internet

BPS. 2019. Kabupaten Manokwari Selatan dalam Angka 2019. Papua Barat; Badan Pusat Statistika Kabupaten Manokwari Selatan.

BPS. 2023. Distrik Ransiki dalam Angka 2023. Papua Barat; Badan Pusat Statistika Kabupaten Manokwari Selatan.

BPS. 2024. Kabupaten Manokwari Selatan dalam Angka 2024. Papua Barat; Badan Pusat Statistika Kabupaten Manokwari Selatan.

Dinas PUPR, Pembangunan Ruas Jalan. <https://pu.go.id/berita/ruas-jalan-nasional-di-kabupaten-manokwari-selatan-dalam-kondisi-mantap> (diakses pada 9 Juli 2024)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kementerian Keuangan.  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kualatungkal/id/titian/sakti.html#>:  
(diakses pada 9 Juli 2024)

Potensial Kabupaten Manokwari Selatan. <https://klikpapua.com/papua-barat/manokwariselatan/ada-21-destinasi-potensial-di-kabupaten-manokwari-selatan.html> (diakses pada 9 Juli 2024)

Profil BIMTEK. [https://www.bppkpd.id/bimtek-simda-bmd/#google\\_vignette](https://www.bppkpd.id/bimtek-simda-bmd/#google_vignette)  
(diakses 27 juni 2024)

Profil Kementerian Keuangan.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15917/Pentingnya-Penatausahaan-BMN.html> (diakses pada 1 Juni 2024)

Profil SIMDA. <https://simda-online.id/t/pengenalan-sistem-informasi-manajemen-daerah-simda/47> (diakses pada 1 Juni 2024)

Sejarah SIMDA-BMD. <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/334/Sejarah-SIMDA.bpkp> (diakses 27 juni 2024)

## **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sakti.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.